

## IMPLEMENTASI PROGRAM RASTRA (BERAS SEJAHTERA) DI DESA TABALONG MATI KECEMATAN AMUNTAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Rizka Puteri<sup>1</sup>, Husaini<sup>2</sup>, Arpandi<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Email : [rezkaputeri026@gmail.com](mailto:rezkaputeri026@gmail.com)

### ABSTRAK

Sebuah Program Beras Sejahtera (RASTRA) sangat penting adanya dalam penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya anggaran dana, kurangnya sosialisasi dan kurangnya koordinasi dari dinas terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi RASTRA di Desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data diambil dengan informan 9 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dan diuji kredibilitasnya dengan menggunakan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, trigulasi analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan membercheck.

Penelitian menunjukkan bahwa Program RASTRA di Desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang optimal. Pada indikator tujuan pelaksanaan optimal, standar pelaksanaan kurang optimal, sasaran RASTRA kurang optimal, sumber daya manusia optimal, sumber daya waktu kurang optimal, ketegasan pelaksana kurang optimal, sikap keras pelaksana kurang optimal, perketatan pelaksana kurang optimal, kebijakan pelaksana optimal, kebijakan penolakan pelaksana optimal, komunikasi antar pelaksana optimal, koordinasi antar instansi kurang optimal, kondisi sosial kurang optimal, kondisi ekonomi kurang optimal, dan kondisi politik kurang optimal. Adapun faktor pendukung tujuan dari RASTRA dirancang untuk membantu meningkatkan kesadaran pelaksana akan pentingnya tinjauan data balik untuk masalah bantuan, kebijakan penerima pelaksana akan di katakan baik apabila sudah terlaksana dengan baik, terhadap komunikasi yang mendukung berjalannya program RASTRA.

Untuk meningkatkan implementasi RASTRA di Desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, disarankan kepada kepala dinas sosial dan dinas kementerian agar meningkatkan komunikasi kepada para pengelola RASTRA di desa, kepada kepala desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara diharapkan lebih meningkatkan lagi ketegasan pelaksana untuk program RASTRA dan kepada tim verifikasi agar bisa terlebih dahulu mengkoordinasi dengan pihak penanggung jawab program RASTRA untuk melakukan kegiatan acara sosialisasi dari dinas terkait.

**Kata kunci:** Implementasi, Program Rastra, dan Beras Sejahtera

### ABSTRACT

*A Program Beras Sejahtera (RASTRA) This research is very important due to the lack of budget, lack of outreach and lack of coordination from the relevant agencies. This research aims to determine the implementation of RASTRA in Tabalong Mati Village, North Amuntai District, North Hulu Sungai Regency and the factors that influence it.*

*This research uses a qualitative approach with a descriptive-qualitative type. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The data source was taken from a informan of 9 people. After the data is collected, its credibility is analyzed and tested using extended observations, increasing persistence, triangulation of negative case analysis, using reference materials and member checking.*

*Research shows that the RASTRA Program in Tabalong Mati Village, North Amuntai District, North Hulu Sungai Regency is less than optimal. In terms of indicators, implementation goals are optimal because they are appropriate for underprivileged communities, implementation standards are less than optimal because they are still adjusting KKS from the Ministry, RASTRA targets are less than optimal because they still haven't received assistance, human resources are optimal because implementers have maximized them, time resources*

*are less than optimal because lack of punctuality in distribution, firmness of implementers is less than optimal because they still ignore this program, tough attitude of implementers is less than optimal because the person in charge is less attentive, strictness of implementers is less than optimal because they are still adjusting to the bank, implementing policies are optimal because they are beneficial for underprivileged communities, policy rejection by implementers is optimal because the community accepts RASTRA assistance well, communication between implementers is optimal because implementers are good at running the program, coordination between agencies is less than optimal because there has been no review, social conditions are less than optimal because there are still those who have not received RASTA, economic conditions are less than optimal because there are shortcomings in terms of the economy, and political conditions are less than optimal due to a lack of attention to regional government support. The supporting factors for the objectives of RASTRA are designed to help increase implementers' awareness of the importance of reviewing data back for aid issues, the implementing recipient's policy will be said to be good if it has been implemented well, and the communication that supports the running of the RASTRA program.*

*To implementasi RASTRA di Desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, it is recommended to the head of social services and ministry services to improve communication with RASTRA managers in the village, to the head of Tabalong Mati village, North Amuntai District, it is hoped that the implementation of the RASTRA program will be more assertive and to the verification team so that they can first coordinate with the person in charge of the RASTRA program. to carry out outreach activities from related agencies.*

**Keywords:** *Implementation, Rastra Program, and Beras Sejahtera*

## PENDAHULUAN

Persoalan perbaikan yang dihadapi bangsa kita semakin kompleks dan mencakup berbagai bidang, antara lain persoalan perundang-undangan, aspek keuangan, sosial budaya, kesehatan masyarakat, serta keamanan dan keamanan. Kemiskinan adalah suatu kondisi datar atau relatif yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang di suatu tempat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, sesuai dengan kualitas atau standar tertentu yang berlaku di mata publik karena sebab-sebab umum, sosial, atau mendasar.

Problematika pembangunan yang dihadapi oleh negara kita semakin kompleks dan mencakup berbagai bidang, baik politik, ekonomi, sosial budaya, stabilitas nasional maupun pertahanan keamanan. Dalam bidang pemerintah banyak permasalahan dan urusan yang harus diselesaikan berkaitan dengan semakin berkembang pesatnya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Agar dapat melancarkan jalannya roda sistem pemerintahan wilayah Indonesia, dibagi wilayah yang lebih kecil sebagaimana ditegaskan dalam pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: Pembagian daerah Indonesia dibagi dalam wilayah yang kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya, ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintah Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Pemberian otonomi daerah Kabupaten/Kota, maka memungkinkan daerah yang bersangkutan yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan Pembangunan, salah satunya ialah penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan kondisi absolute atau relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok Masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya, sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam Masyarakat karena sebab-sebab natural atau alami, kultural atau structural. Kemiskinan alami adalah kemiskinan yang disebabkan keterbatasan kualitas sumber daya alam maupun sumber daya manusia, kemiskinan kulutral adalah kemiskinan yang lebih banyak disebabkan sikap individu dalam Masyarakat yang mencerminkan gaya hidup, perilaku, atau budaya yang menjebak dirinya dalam kemiskinan.

Sementara itu, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam Pembangunan adalah masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan terus menerus menjadi masalah yang berkepanjangan, bahkan sampai sekarang dapat dikatakan semakin memprihatinkan. Kemiskinan tercermin dari belum terpenuhinya hak-hak dasar Masyarakat miskin. Hak-hak dasar tersebut antara lain adalah hak tas pangan, Kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, tanah, sumber daya alam, air bersih, rasa aman, serta hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik dan proses pembangunan. Sedangkan dampak dari kemiskinan, yaitu jutaan anak tidak dapat mengenyam pendidikan berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya akses terhadap pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya Tabungan dan tidak ada investasi, serta tidak adanya perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi kekota, dan yang lebih parah kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan secara terbatas. Hal ini membuktikan bahwa masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan kronis dalam proses Pembangunan.

Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimilisir masalah kemiskinan ini seperti melalui Program Beras Sejahtera. Program Beras Sejahtera merupakan salah satu usaha dari pemerintah yang dilakukan guna menanggulangi masalah kemiskinan, dalam menghadapi situasi ini, pemerintah telah memutuskan membentuk Tim Pemantau Ketahanan Pangan yang prinsipnya merupakan *Food Crisis Center* atau pusat penanggulangan krisis pangan. Langkah ini ditindak lanjuti dengan dilakukan Operasi Pasar Khusus Beras yang operasionalnya dilakukan oleh BULOG. Penunjukan BULOG untuk melaksanakan program ini antara lain karena beberapa alasan seperti persiapan sarana perdagangan, sumber daya manusia, dan stok beras BULOG yang tersebar di seluruh Indonesia, dan mekanisme pembiayaan yang kemungkinan BULOG mendistribusikan bersanya, kemudian baru ditagih kepada pemerintah. Setiap tahunnya Program OPK ini dievaluasi dan terus dilakukan penyempurnaan. Pada tahun 2002 program ini diganti menjadi Raskin (Beras Miskin) kemudian pada tahun 2015 diganti lagi menjadi Program Rastra (Beras Sejahtera) oleh Menteri Sosial yang pada dasarnya untuk mengubah paradigma Masyarakat bukan untuk membantu Masyarakat miskin, melainkan program ini disubsidi pemerintah untuk mengubah kehidupan masyarakat lebih sejahtera. Penyaluran Rastra ini merujuk pada Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6-100/MENKO/PMK/XXI/2015, 15 Desember 2015 dengan Perihal Rastra Provinsi tahun 2016 dan Penetapan Anggaran Subsidi beras yang merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan gabah/Beras dan penyaluran beras oleh pemerintah.

Beras Sejahtera (Rastra) merupakan program yang sama dengan Raskin hanya yang membedakannya sebutan untuk program tersebut dan pembagian beras yang sebelumnya 12 kali dalam setahun menjadi 14 kali pembagian dalam setahun. Menurut DPR-RI (2015) menjelaskan bahwa istilah sebelumnya kata Beras Miskin (Raskin) dianggap kurang sopan untuk didengar maka diubah menjadi Beras Sejahtera (Rastra), tetapi perubahan istilah tersebut tetap memiliki tujuan yang sama. Menurut DPR-RI (2015), Edhy Prabowo selaku Ketua Komisi IV dalam rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Perum Bulog (17/09/2015) menjelaskan bahwa Beras Sejahtera ini diartikan jangan menganggap atau mendiskreditkan orang, agar bahasa penyebutannya lebih sopan didengar, namun yang paling penting bukan Namanya tetapi adalah kualitasnya yang sampai kepada RTS tidak berketu, berbau dan pecah-pecah sehingga kualitasnya harus terjamin.

Namun pada tahun 2018 merupakan awal peralihan yang semula berupa bersubsidi menjadi pola bantuan sosial. Hal ini disampaikan oleh Presiden RI, pada Rakyat Kabinet Terbatas (Ratas) tentang program, penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi pada tanggal 16 Maret 2016, agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai.

Bantuan sosial pangan dapat disalurkan dalam bentuk natura (beras) atau disebut sebagai Bansos Rastra, diberikan dalam bentuk Beras sejumlah 10Kg dengan kualitas medium dan disalurkan setiap bulan tanpa dikenakan biaya harga/tebus. Bansos Rastra bertujuan untuk mengurangi beban

pengeluaran dan meningkatkan akses Masyarakat miskin melalui pemenuhan pangan pokok yang menjadi hak dasarnya. Dalam pelaksanaan penyaluran, Perum BULOG mendapat tugas untuk mendistribusikan Bansos Rastra hingga Titik Distribusi (TD). Kemudian pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam Pendistribusian Titik Bagi (TB).

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lihat dalam Program Rastra (Beras Sejahtera) ada beberapa masalah yakni :

1. Data tidak valid, sehingga banyak tidak tepat sasaran. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurang tepatnya sasaran program ini, misalnya Masyarakat yang Sejahtera tetapi masih menerima bantuan melalui program Rastra, dan sebaliknya Masyarakat yang benar-benar berada dalam kategori miskin tetapi tidak mendapatkan bantuan rastra ini. (*Sumber: Data Bansos Rastra di Kantor Desa Tabalong Mati, Tahun 2023.*)
2. Kurangnya sosialisasi pemerintah kepada warga masyarakat mengenai Program Beras Raskin/Rastra seperti, kurangnya komunikasi dalam pembagian atau penyaluran Beras Raskin/ Beras Rastra Dimana seharusnya ada komunikasi antara pihak pemerintah pusat dan daerah sehingga dalam masalah keterlambatan pihak pelaksana penyaluran dapat memberikan penjelasan yang lebih rasional. (*Sumber: Data Pendampingan Bansos Rastra di Kecamatan Amuntai Utara, Tahun 2023*)
3. Terbatasnya anggaran, sehingga pemilihan menjadi tidak akurat dengan keadaan masyarakat. Hal ini terjadi akibat masih buruknya koordinasi antara birokrasi dari pusat, provinsi kabupaten/kota, hingga desa, atau kelurahan. Akibatnya, kuantitas (jumlah) keluarga miskin yang didata bisa lebih besar atau lebih sedikit dari sebenarnya, sehingga rastra yang dibagikan akan berdampak pada kekurangan atau bahkan kelebihan jatah. (*Sumber: hasil observasi awal penelitian, Tahun 2023*)

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana penelitian adalah sebagai instrument kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian yang menjadi sasaran penelitian secara mendalam. Artinya dilakukan untuk mengungkap segala sesuatu atau berbagai aspek dari sasaran penelitiannya. Suatu penelitian ilmiah diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, yaitu manfaat bagi kehidupan nyata. Berupa apa manfaatnya tergantung pada topik penelitiannya. (I Gusti Agung Oka Yadnya, 2021:50) Prosedur pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Secara keseluruhan, informan yang dilibatkan berjumlah sembilan orang. Data yang diambil yaitu data primer dan data sekunder

Data primer adalah data yang diperoleh untuk atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer juga disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. (Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, 2015:67-68)

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. (Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, 2015:67-68)

Berkaitan dengan penelitian ini mengenai Implementasi Kebijakan Program Rastra (Beras Sejahtera di Desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara maka dirancang suatu penelitian untuk mengukur baik buruknya suatu konsep. Adapun teknik Desain Operasional dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Donald Van Meter dan Carl van Horn yang

mengemukakan model Implementasi Kebijakan menunjuk pada enam variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan Implementasi. Enam variabel tersebut adalah :

Menurut teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam Agustino (2020:150-153) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, adalah:

a) Ukuran dan Tujuan kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat di ukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di dari level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

b) Sumber Daya

Sumberdaya Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menurut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan public sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumberdaya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah: sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Karena, mau ketika sumberdaya yang kompoten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu. Sant sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana bejalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat dapat menjadi penyebab ketidak berhasilan implementasi kebijakan.

Karena itu sumberdaya yang diminta dan dimaksud oleh Van metter dan Van Horn adalah ketiga bentuk sumberdaya tersebut.

c) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi dan formal organisasi informal informal yang akan terlibat pengimplimentailan kebijakan publik Hal ini sangat penting karma kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok denga para agen pelaksananya. Misalnya implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindak laku manusia secara radikal, maka gen pelaksana projek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat saja agen pelaksana yang diturun tidak sekeras dan tidak setegus pada gambaran yang pertama.

d) Komunikasi AntarOrganisasi dan Aktivitas pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil ketika untuk terjadi dan begitu pula sebaiknya.

e) Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan public.hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan "dari atas (*top down*) yang sangat mungkin paraa pengambilan keputusanya tidak pernah mengetahui (bahkan

tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permastahan yang warga ingin selesaikan.

f) Lingkungan Ekonomi, sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter dan Hom adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

## PEMBAHASAN

Menurut Donal Van Metter dan Carl Van Horn (2020:150-153) Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel yaitu:

1. Ukuran Tujuan dan Kebijakan

a. Tujuan Pelaksanaan

Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam Implementasi Program Rastra (Beras Sejahtera) Di Desa Tabalong Mati tujuannya optimal dirancang untuk membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga.

b. Standar Pelaksana RASTRA

Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam Implementasi Program Rastra (Beras Sejahtera) Di Desa Tabalong Mati tujuannya optimal dirancang untuk membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga.

c. Sasaran dari RASTRA

Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam Implementasi Program Rastra (Beras Sejahtera) Di Desa Tabalong Mati sasarannya kurang optimal karena ada masyarakat yang kurang mampu belum mendapatkan bantuan beras sejahtera (RASTRA) ini.

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam Implementasi Program Rastra (Beras Sejahtera) Di Desa Tabalong Mati sumber daya manusia optimal untuk program bantuan beras Sejahtera (RASTRA).

b. Sumber Daya Waktu

Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam Implementasi Program Rastra (Beras Sejahtera) Di Desa Tabalong Mati sumber daya waktunya cukup optimal tetapi setiap awal tahun ada kendala dalam pembagiannya karena menunggu pihak kementerian.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

a. Ketegasan Pelaksana

Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam Implementasi Program Rastra (Beras Sejahtera) Di Desa Tabalong Mati karakter dalam penegasannya kurang optimal karena masyarakat masih ada yang membutuhkan bantuan beras sejahtera (RASTRA) ini.

b. Sikap Keras Pelaksana

Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam Implementasi Program Rastra (Beras Sejahtera) Di Desa Tabalong Mati sikap kerasnya masih kurang terhadap pelaksana karena masih ada masyarakat yang mengharapkan bantuan tersebut.

c. Perketatan Pelaksana

Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam Implementasi Program Rastra (Beras Sejahtera) Di Desa Tabalong Mati dalam pengetatan program beras Sejahtera (RASTRA) kurang optimal dalam perlu ditingkatkan lagi dalam pengetatan program pelaksanaannya.

#### 4. Sikap/Kecenderungan para Pelaksana (*Disposition*)

##### a. Kebijakan Penerima Pelaksana

Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam Implementasi Program Rastra (Beras Sejahtera) Di Desa Tabalong Mati kebijakan penerima pelaksana sudah optimal karena adanya program tersebut bisa sangat membantu pada masyarakat desa tabalong mati dengan bantuan program beras Sejahtera (RASTRA).

##### b. Kebijakan Penolakan Pelaksana

Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam Implementasi Program Rastra (Beras Sejahtera) Di Desa Tabalong Mati kebijakan penolakan pelaksana program bantuan ini sudah optimal dan jika ada masyarakat yang mampu mau juga mendapatkannya bantuan tersebut harus ditolak.

#### 5. Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan

##### a. Komunikasi Antar Pelaksana

Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam Implementasi Program Rastra (Beras Sejahtera) Di Desa Tabalong Mati komunikasi dalam pelaksanaan program bantuan beras Sejahtera (RASTRA) sudah optimal.

##### b. Koordinasi Antar Instansi

Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam Implementasi Program Rastra (Beras Sejahtera) Di Desa Tabalong Mati koordinasi pelaksanaannya masih kurang optimal karena ada Sebagian masyarakat desa yang belum mendapatkan bantuan tersebut dengan rata.

#### 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik

##### a. Kondisi Sosial

Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam Implementasi Program Rastra (Beras Sejahtera) Di Desa Tabalong Mati kurang optimal karena kondisi sosial pada desa tersebut masih ada kekurangan pada masyarakat desa tersebut.

##### b. Kondisi Ekonomi

Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam Implementasi Program Rastra (Beras Sejahtera) Di Desa Tabalong Mati kurang optimal dirancang untuk membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga.

##### c. Kondisi Politik

Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam Implementasi Program Rastra (Beras Sejahtera) Di Desa Tabalong Mati pemerintah pihak instansi kurang optimal untuk membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga.

#### 1. Faktor Penghambat

##### a. Kurang Tepat Sasaran yang Menjadi Penerima Bantuan Sosial

Hasil penelitian disimpulkan bahwa Program Beras Sejahtera (RASTRA) kurang optimal karena ketidak setaraan dengan sasaran yang kurang tepat sehingga sebagian masyarakat yang masih kurang mendapatkan bantuan oleh pihak pelaksana.

##### b. Tujuan Program Penggunaan Dana KPM yang Tidak Sesuai Dengan Tujuan Awal

Hasil penelitian disimpulkan bahwa Program Beras Sejahtera (RASTRA) di Desa Tabalong Mati kurang sesuai karena ketidak sesuaian dengan tujuan yang sudah ditetapkan oleh pihak pemerintah yang jadinya masyarakat masih sebagian kurang mendapatkan bantuan beras oleh pihak pelaksana.

#### 2. Faktor Pendukung

##### a. Sumber Daya Manusia di Desa Tabalong Mati

Hasil penelitian disimpulkan bahwa Program Beras Sejahtera (RASTRA) di Desa Tabalong Mati optimal karena berjalan dengan cukup baik tentang pendorong masyarakat yang masih kurang mampu sehingga dengan adanya program ini bisa terbantu perekonomiannya.

b. Sebagai Bukti Pemerintah Peduli Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tabalong Mati

Hasil penelitian disimpulkan bahwa Program Beras Sejahtera (RASTRA) di Desa Tabalong Mati optimal karena berjalan dengan sudah baik tentang pendorong pemerintah untuk masyarakat yang masih kurang mampu sehingga dengan adanya program ini bisa terbantu perekonomiannya.

## SIMPULAN

Implementasi Program Beras Sejahtera (RASTRA) di Desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara kurang optimal. Adapun aspek yang optimal yaitu: Pertama, Pada indikator tujuan dari pelaksanaan karena untuk membantu keluarga yang kurang mampu. Kedua, Sumber daya manusia dari pelaksanaan RASTRA karena pelaksana sudah baik. Ketiga, pada indikator kebijakan penerima pelaksana dari RASTRA karena bermanfaat bagi keluarga yang membutuhkan. Keempat, pada indikator kebijakan penolakan pelaksana karena sudah baik terutama untuk Masyarakat yang masih mampu dan menolaknya untuk mendapatkannya. Kelima, pada indikator komunikasi implementor terhadap masyarakat karena responnya cukup baik. Adapun aspek yang kurang optimal yaitu: Pertama, pada indikator standar kurang optimal untuk program RASTRA karena masih ada kurangnya peningkatan. Kedua, pada indikator sasaran kurang optimal karena sebagian masih ada yang mampu tetapi masih mendapatkan RASTRA. Ketiga, pada indikator sumber daya waktu kurang optimal dalam karena terkendala dengan pihak instansi terkait. Keempat, pada indikator ketegasan pelaksana kurang optimal karena meningkatkan ketegasan dalam melaksanakan programnya. Kelima, pada indikator koordinasi antar instansi kurang optimal karena belum terlaksana dengan baik. Keenam, Lingkungan sosial kurang optimal karena masih ada yang mempunyai sifat pemalu. Ketujuh, Lingkungan ekonomi kurang optimal karena masih ada kekurangan dalam segi ekonominya. Kedelapan, Kondisi politik dari kantor desa dan Dinas Sosial kurang optimal karena mengunjungi dan menanyakan permasalahan apa saja yang ada desa ini perlu tidak membiarkan desa berjalan tanpa adanya pendamping. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Beras Sejahtera (RASTRA) di Desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu: Pertama, Faktor penghambat adalah faktor kurangnya sikap tegas dari pelaksana yang kurang inovasi. Kedua, kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ketiga, kurangnya perhatian dari pemerintah daerah untuk program RASTRA. Keempat, Kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh tim-tim verifikasi kepada pengelola kebijakan RASTRA. Adapun faktor yang mendukung adalah pihak Masyarakat yang kurang mampu karena jika tidak ada dukungan dari Masyarakat tidak mampu tersebut program RASTRA tidak akan terlaksana.

## DAFTAR PUSTAKA

Agustino Leo, 2020. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.

Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.

Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.

Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.

Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.

Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.

Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administratus*, 8(2), pp. 56–68.

Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.

Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) 'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.

Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.

Urahmah, N. and Isma, I. (2023) 'IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.

Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.



- Firdianti Arinda,2018. *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah*. Yogyakarta:CV GRE PUBLISHING
- Hidayati Wiji,2021. *Manajemen Kurikulum dan Program Pendidikan konsep dan strategi pengembangan*. Yogyakarta.
- Ibrahim,2018. *Penelitian Kuliitatif*. Bandung:Alfabeta.
- Ismail Nawari,2015. *Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam*. Samudra Biru.
- Joko Pramono,2022. *Kajian Kebijakan Publik Analisis Implementasi dan Evaluasinya di Indonesia*. Kota Surakarta.
- Kertati Indra,2023. *Implementasi Kebijakan Publik*. Kota Jambi:PT Sanpedia Publishing Indonesia.
- Marzali Amri, 2015. *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Jakarta:Karisma Putra Utama
- Ramadhan Muhammad,2021. *Metode Penelitian*. Surabaya.
- Subarsono Ag,2021. *Analisis kebijakan Publik*. Yogyakarta.
- Sarie Fatma, 2024. *Metodologi Penelitian*. Kota Batam:Yayasan Cendekia Mulia Mandiri.
- Samito Cahyo,2020. *Manajemen Kebijakan Publik Sektor Pariwisata*. Malang.
- Sari Permata Desi,2023. *Implementasi Transaksi Penjualan Laporan Keuangan*. Padang:CV Gita Lentara
- Satispi Evi,2023. *Implementasi Kebijakan Publik Evidance-Base Policy*. Yogyakarta.
- Sodik Ali. M,Siyoto Sandu,2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta.
- Tjilen Phuk Alexander,2019. *Kebijakan Publik*. Bandung:Nusa Media.
- Yadnya Oka Agung Gusti I, 2021. *Panduan Praktis Menulis Karya Ilmiah*. Guepedia.
- Yusri Mohd,2021. *Kebijakan dan Perencanaan Sosial di Indonesia*. Medan